



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PERUBAHAN PRADIGMA: SEJARAH DAN EVOLUSI ILMU POLITIK DI ABAD KE-21

Siti Irnawati¹, Widianita², Rani Novianti Anggini³

¹Universitas Mataram, NTB, Indonesia, irna8342@gmail.com

²Universitas Mataram, NTB, Indonesia, wdntt511@gmail.com

³Universitas Mataram, NTB, Indonesia, raninoviantianggini@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai perubahan paradigma sejarah dan evolusi ilmu politik di abad ke-21 yang mengangkat permasalahan mengenai perubahan besar dalam ilmu politik yang dipengaruhi secara langsung oleh perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan isu-isu kontemporer yang semakin kompleks. Di tengah munculnya tantangan baru seperti adanya digitalisasi politik, misinformasi, dan polarisasi sosial yang muncul melalui media digital, ilmu politik perlu beradaptasi dengan metodologi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Perubahan ini tidak hanya menuntut penyesuaian terhadap pendekatan analitis, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam proses pendidikan dan kajian politik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perubahan paradigma sejarah dan evolusi ilmu politik di abad ke-21, dengan fokus penelitian yang tertuju pada dampak globalisasi dan teknologi digital terhadap politik serta pendidikan politik. Manfaat dari artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait dengan perubahan paradigma sejarah dan evolusi ilmu politik di abad ke-21 yang dipengaruhi langsung oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang diambil dari berbagai literatur dan analisis konseptual untuk memahami evolusi ilmu politik di abad ke-21, perkembangan teknologi abad ke-21, dampak teknologi abad ke-21, perubahan dalam ilmu politik, dan dampaknya terhadap dinamika politik global serta pendidikan ilmu politik.

Kata Kunci: Evolusi ilmu politik, abad ke-21, perubahan paradigma, digitalisasi politik, globalisasi

*Correspondence Address: irna8342@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Ilmu politik di abad ke-21 mengalami transformasi signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta munculnya berbagai permasalahan kontemporer yang semakin kompleks. Dunia politik kini tidak hanya terbatas pada ruang konvensional seperti lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, namun juga dipengaruhi oleh fenomena baru yang muncul dalam ranah digital, seperti media sosial, disinformasi, serta polarisasi opini publik. Perubahan ini memaksa ilmuwan politik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif agar dapat memahami dinamika politik global yang terus berkembang.

Selain itu, teknologi digital juga memiliki dampak besar terhadap pendidikan politik. Platform digital dan media sosial kini memainkan peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi politik publik. Di sisi lain, fenomena misinformasi dan penyebaran berita palsu di dunia maya menambah tantangan dalam memahami dan mengelola dinamika politik yang ada.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan ilmu politik di abad ke-21 beradaptasi dengan perubahan besar ini, serta mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi memengaruhi partisipasi politik dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perubahan utama dalam ilmu politik serta menganalisis dampaknya terhadap pemahaman kita tentang politik dan masyarakat di era digital.

Sejak akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, ilmu politik menghadapi berbagai tantangan baru yang mengubah cara pemahaman dan praktik politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah globalisasi, yang membawa dampak besar terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial di berbagai belahan dunia. Globalisasi membuka peluang dan tantangan baru, di antaranya dalam hal interaksi antarnegara, penyebaran informasi, serta perubahan dalam struktur kekuasaan global. Selain itu, revolusi digital dan perkembangan teknologi informasi semakin memperburuk pergeseran ini, di mana platform digital seperti media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana politik yang mempengaruhi opini publik, proses pemilu, serta kebijakan pemerintah.

Fenomena misinformasi dan disinformasi, yang sering kali tersebar melalui media sosial, juga menjadi masalah besar di abad ke-21. Penyebaran berita palsu dan hoaks dapat memengaruhi persepsi publik, memperburuk polarisasi politik, dan mengganggu proses demokrasi. Munculnya echo chambers dan filter bubbles dalam dunia maya semakin memperburuk ketegangan sosial dan politik. Dalam konteks ini, ilmuwan politik dituntut untuk mencari pendekatan baru yang lebih inklusif, dapat memahami kompleksitas situasi politik, serta lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat global yang semakin terhubung.

Di sisi lain, pendidikan politik di perguruan tinggi juga mengalami transformasi akibat kemajuan teknologi. Pembelajaran politik kini lebih mengutamakan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, memperluas akses ke sumber daya informasi, serta mengembangkan metode baru dalam pengajaran yang lebih interaktif dan inklusif. Dengan demikian, perkembangan ilmu politik di abad ke-21 mencakup tidak hanya perubahan dalam teori dan praktik politik, tetapi juga perubahan dalam cara politik dipelajari dan diterapkan. Melihat fenomena ini, penting untuk mengkaji bagaimana ilmu politik beradaptasi dengan perubahan besar di abad ke-21, baik dari segi metodologi, tantangan yang dihadapi, maupun dampak dari teknologi terhadap dinamika politik global dan pendidikan politik

METODE | METHOD

Artikel ini disusun menggunakan metode Pustaka sebagai pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang membahas tentang perubahan paradigma sejarah dan evolusi ilmu politik di abad ke-21. Menurut APSA, (2011), Dengan mengandalkan literatur yang sudah ada, maka dapat membangun kerangka teori yang kuat dan memperkuat argumen dengan data atau pendapat para ahli yang kredibel.

Alasan pemilihan metode ini adalah karena studi pustaka memungkinkan untuk melakukan kajian secara mendalam tanpa keterbatasan ruang dan waktu seperti pada penelitian lapangan. Selain efisien dari segi biaya dan waktu, metode ini juga cocok untuk topik yang membutuhkan pemahaman konseptual yang luas, seperti nilai-nilai ideologis dan karakter

generasi. Dengan demikian, metode ini dinilai paling tepat untuk mengkaji pengaruh paradigma sejarah dan evolusi ilmu politik di abad ke-21.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Sejak awal abad ke-21 ilmu politik memasuki babak baru. Di sepanjang dekade terakhir abad ke-20 dan dekade awal abad ke-21 telah terjadi berbagai kejadian signifikan, seperti berebaknya konflik etnis, agama, dan kekuasaan di tingkat lokal maupun regional, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, terutama internet dan piranti komunikasi canggih, media massa, fenomena “dusun global,” degradasi lingkungan dan pemanasan global, perdagangan bebas, isu hak asasi manusia, interdependensi antarnegara-bangsa, serta isu-isu ekonomi dan perdagangan lainnya. Kesemuanya ini menimbulkan arah baru dalam penelitian di bidang ilmu politik. Topik-topik baru yang makin menarik bagi sarjana ilmu politik di awal abad ke-21 terus bermunculan, mulai dari politik lingkungan sampai feminisme politik, sekaligus muncul kajian reflektif atau swakritik untuk mencari persoalan yang ada di dalam bangunan disiplin ilmu politik itu sendiri. Misalnya, pada tahun 2000 muncul apa yang disebut gerakan “perestroika” yang menunjukkan dua persoalan dalam disiplin ilmu politik: kurangnya inklusivitas dan makin seringnya penggunaan pendekatan matematika. Ini menimbulkan kemungkinan bahwa pendulum ilmu politik mungkin akan bergeser kembali, atau setidaknya mengurangi kecenderungan orientasi kuantitatif dalam disiplin ilmu politik dan membuatnya lebih inklusif agar dapat memahami situasi terkini yang dicirikan oleh globalisasi dan makin inklusifnya studi-studi di berbagai bidang (di mana satu bidang studi mau tidak mau harus menggunakan, meminjam, atau mengintegrasikan bidang studi lain).

Jelas bahwa tantangan yang dihadapi ilmuwan politik di abad ke-21 makin kompleks seiring dengan berubahnya lanskap politik mulai dari level lokal, nasional, dan internasional. Ini menyebabkan ilmu politik menghadapi tugas yang relatif baru. Misalnya, American Political Science Association (APSA, 2011) membentuk gugus tugas untuk mengkaji ilmu politik untuk abad ke-21, guna menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti: bagaimanakah ilmu politik mengkaji fenomena kontemporer seperti demografi baru yang sedang berubah, diversitas multikultural, kesenjangan konsentrasi kekayaan di banyak negara-bangsa? Dapatkah ilmu politik melakukan studi terhadap fenomena baru itu melalui riset, pengajaran dan kajian profesionalnya? APSA (2011) dalam laporan yang sama juga merekomendasikan beberapa hal penting agar ilmu politik lebih inklusif, seperti: ilmuwan politik harus lebih sistematis dalam mengembangkan program pendidikan untuk mendorong mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk mempelajari ilmu politik secara profesional, di mana mereka harus bekerja sama dengan disiplin lain baik pada level akademik maupun praktis; jurusan ilmu politik di kampus disarankan untuk mulai menekankan pada persoalan ras dan ketimpangan; metodologi penelitian dan pendidikan juga harus lebih inklusif dan menggunakan pendekatan analitis kritis, melengkapi wawasan disiplin ini dengan wawasan dari disiplin lain; dan sebagainya. Sebagian sarjana politik lainnya mulai mengeksplorasi dan mengkaji bagaimana kemauan teknologi informasi akan mengubah hubungan internasional dan tata pemerintahan global, bagaimana menyusun metode pendidikan ilmu politik yang baru dan menciptakan potensi lebih besar bagi upaya demokratisasi.

Sebagaimana dalam disiplin ilmu lainnya, untuk melangkah lebih lanjut di tengah tengah perkembangan keilmuan dan perubahan zaman dan menjawab rekomendasi dari tantangan seperti yang telah dikutip di atas, para mahasiswa dan ilmuwan politik tentunya tidak boleh kehilangan pemahaman tentang akar dari setiap bidang studi ilmiah sebab dengan memahami rentetan peristiwa dan perkembangan dalam sejarah baik itu di dalam ilmu politik maupun peristiwa politik di dunia nyata, sarjana politik akan lebih siap dan mampu untuk merumuskan perspektif atau teori baru yang relevan dengan zamannya. Referensi panduan tematis ini menjadi penting karena di dalamnya tidak hanya memuat banyak sejarah dan konsep dasar

dalam teori politik dan ilmu politik, tetapi juga menunjukkan kemungkinan arah baru dalam perkembangan kajian ilmu politik di abad ke-21 ini.

Abad 21 memiliki banyak perbedaan dengan abad 20 dalam berbagai hal, diantaranya dalam pekerjaan, hidup bermasyarakat dan aktualisasi diri. Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi dimana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer. Sebagaimana sudah diketahui dalam abad ke 21 ini sudah berubah total baik masyarakat maupun dunia pendidikannya. Sekolah yang dipahami sampai saat ini sudah terbentuk sejak abad ke 19 dalam rangka pengembangan pendidikan anak dan juga mendorong industrialisasi. Jadi awalnya sekolah itu dibentuk untuk mendukung pembentuk masyarakat madani dan juga industrialisasi namun sejak tahun 1989 dimana sejak Jerman sudah bersatu tiba-tiba mulai era globalisasi sampai saat ini, seperti di Negara Amerika Utara, Eropa dan Amerika Timur sudah terjadi globalisasi lebih awal. Kalau negara-negara Asia belum menjadi satu karena terjadi keanekaragaman budaya dan suku, namun pada suatu saat akan terjadi seperti di negara barat. Jadi negara/pasar akan menjadi satu dan mungkin mata uang akan menjadi satu. Jadi kalau jaman dulu pasar itu per negaranya tapi saat ini karena adanya globalisasi, suatu kesatuan komunikasi akan menjadi luas

Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan (*knowledge age*), dalam era ini, semua alternative upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan (*knowledge based education*), pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economic*), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based social empowering*), dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan (*knowledge based industry*). Adapun pengaruh pradigma evolusi ilmu politik di abad ke-21 diantaranya sebagai berikut:

1. Evolusi ilmu politik di abad ke-21

a. Misinformasi dan Polarisasi dalam Dunia

Digital Meskipun media sosial membuka ruang baru untuk partisipasi politik, masalah besar yang muncul adalah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan (*misinformation* dan *disinformation*). Fenomena ini semakin jelas pada pemilu 2019, ketika berita palsu dan hoaks menyebar dengan cepat di platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter.

Manipulasi Opini Publik: Berita palsu sering digunakan untuk menyerang lawan politik, membentuk opini yang menguntungkan pihak tertentu, atau merusak kredibilitas kandidat lainnya. Salah satu contoh mencolok adalah penyebaran informasi hoaks mengenai latar belakang calon presiden atau isu-isu sensitif seperti agama dan etnis.

Echo Chambers dan Filter Bubbles: Algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai dengan preferensi pengguna memperburuk polarisasi. Banyak pengguna terjebak dalam echo chambers-lingkungan informasi yang memperkuat pandangan mereka, mengabaikan pandangan yang berbeda. Ini menyebabkan polarisasi yang semakin tajam dalam politik Indonesia.

b. Digitalisasi Partisipasi Politik dan Akses Informasi Pemerintahan yang Lebih Terbuklewat Platform Digital

Salah satu dampak positif dari revolusi digital dalam politik Indonesia adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi dari pemerintah. Presiden, misalnya, memanfaatkan platform seperti Twitter dan Instagram untuk membagikan pembaruan terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah.

Transparansi dan Keterlibatan Publik: Melalui platform digital, pemerintah dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa perantara media massa, yang memberikan akses lebih besar ke informasi terkait kebijakan dan program-program pemerintah.

E-Participation: Ada juga upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui platform digital. Beberapa pemerintah daerah mulai memanfaatkan situs atau aplikasi untuk menerima masukan warga dalam perencanaan pembangunan, memungkinkan warga untuk menyampaikan saran dan ide secara langsung.

2. Perkembangan teknologi abad ke-21

Kemajuan teknologi telah mempersingkat siklus produksi dan peningkatan produktivitas secara dramatis. Dalam kemajuan dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, komputer yang mengambil, menggantikan, atau melengkapi banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di berbagai bidang seperti informasi pengolahan dan tugas berdasarkan aturan, mengakibatkan meningkatnya permintaan untuk keterampilan tingkat tinggi (Levy dan Murnane, 2004).

Agar mampu menunjang penguasaan iptek, kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi perlu diperdalam strukturnya, baik yang berkaitan dengan magang, pengadaan biaya pendidikan, maupun pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kerjasama berguna bagi sekolah untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi baru karena industri jauh lebih peka terhadap munculnya teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) memainkan peran penting dalam masyarakat karena berperan dalam beberapa aspek seperti sosial, budaya dan ekonomi untuk mencari informasi dari Internet. Mengingat bahwa semua anak-anak berhak mendapatkan wajib belajar, sekolah adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan kompetensi ICT (Tondeur, 2007: 962).

3. Dampak Teknologi Abad 21

a. Pembelajaran Interaktif

Pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif (Gani & Saddam, 2020). Pemahaman mengenai wawasan nusantara menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia sebagai dasar untuk menjaga persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI (Ratih & Najicha, 2021). Teknologi abad ke-21 telah memungkinkan pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih interaktif dan menarik. Tenaga pengajar dapat memberikan simulasi peristiwa politik, debat, atau proyek tim yang mendorong mahasiswa untuk secara aktif terlibat dalam memahami masalah kewarganegaraan dan mendorong pemikiran kritis mereka tentang peran mereka dalam masyarakat yang demokratis melalui berbagai aplikasi pendidikan dan platform online. Fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar yang ditawarkan oleh teknologi mengubah cara mahasiswa terlibat dalam pembelajaran kewarganegaraan, meningkatkan kesadaran mereka akan peran dan tanggung jawab kewarganegaraan mereka.

b. Simulasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah "ruang baru" yang bersifat artifisial dan maya, yaitu cyberspace. Cyberspace telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia (politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, seksual) di „dunia nyata“ ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisialnya, sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata kini dapat dilakukan dalam bentuk artifisialnya di dalam cyberspace (Piliang, 2012). Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan simulasi situasi politik, yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Menurut hasil penelitian (Afgrinadika Wibowo et al., 2022), para elit politik di negeri ini sudah banyak kehilangan etika politik. Karenanya, mayoritas pemilih pemula memiliki orientasi dinamis terhadap politik dan terkesan tentatif. Siswa dapat mengalami keputusan dan masalah yang akan mereka hadapi di dunia nyata dalam simulasi ini, memberikan mereka kepercayaan diri untuk berperan sebagai warga negara yang aktif dan mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi

pilihan politik. Simulasi ini juga menumbuhkan suasana belajar yang inklusif di mana siswa dapat berkolaborasi, terlibat dalam diskusi, dan memahami berbagai sudut pandang yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, penggabungan teknologi ke dalam simulasi politik dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang politik serta kemampuan mereka untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan memimpin orang lain-keterampilan yang sangat penting dalam konteks politik yang rumit saat ini. (Samsuri, 2011) dengan demikian, perhatian utama politik pendidikan akan mempergunakan pula domain-domain ilmu politik seperti: kekuasaan (power), pengaruh (influence), konflik (pertikaian), dan alokasi nilai-nilai otoritatif (authoritative allocation of values). Penggunaan Sumber Daya Multimedia Teknologi abad 21 memungkinkan pendidik untuk seperti video, grafik interaktif memanfaatkan sumber daya multimedia, dan presentasi multimedia, untuk memperkaya materi kewarganegaraan dan membuatnya lebih menarik bagi mahasiswa. Untuk konsep-konsep yang bersifat abstrak dan tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas, penggunaan multimedia pembelajaran berbasis komputer akan sangat membantu pendidik dalam menjelaskan suatu konsep (Nurgiansah, 2019). Misalnya, dengan menciptakan narasi visual yang menarik dan memperkenalkan realitas ke dalam kelas memanfaatkan sudut pandang yang beragam. Hal ini mendorong para pendidik untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dalam melawan penyebaran informasi yang salah dan mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi media mereka. Selain itu, perpotongan antara kesulitan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan evolusi masyarakat global menggarisbawahi perlunya mendukung sistem pendidikan yang membekali siswa dengan keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk menjadi individu yang toleran dan inklusif yang dapat secara aktif terlibat dalam masyarakat global yang saling terhubung yang terus berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidikan kewarganegaraan untuk terlibat dalam penilaian diri dan inovasi yang berkelanjutan agar dapat secara efektif mengatasi masalah-masalah ini dan pada akhirnya memenuhi tujuan utamanya untuk menumbuhkan individu yang cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Ilmu politik di abad ke-21 mengalami perkembangan pesat sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan global yang semakin rumit, seperti konflik identitas, kemajuan teknologi digital, globalisasi, serta perubahan sosial dan ekonomi. Teknologi informasi membawa perubahan besar dalam cara politik dijalankan dan dipelajari dari penyebaran hoaks dan polarisasi opini publik hingga meningkatnya partisipasi masyarakat melalui media digital. Di sisi lain, pendidikan politik juga bertransformasi lewat pendekatan yang lebih interaktif dan pemanfaatan teknologi, sehingga mahasiswa lebih terdorong untuk berpikir kritis dan berperan aktif dalam kehidupan politik.

Gerakan pembaruan dalam ilmu politik, seperti gerakan "Perestroika", menyoroti perlunya pembaruan pendekatan agar lebih terbuka dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Rekomendasi dari APSA (2011) menegaskan pentingnya kurikulum ilmu politik yang mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti ketimpangan sosial, keberagaman, dan keadilan rasial, serta mendorong kolaborasi lintas bidang ilmu. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu politik harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berubah dengan cepat.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan perkembangan ilmu politik sangat penting agar para akademisi dan mahasiswa mampu mengembangkan teori dan pendekatan politik yang lebih relevan, demokratis, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan dunia modern.

REFERENSI | REFERENCE

- Afi'iyah. (2009). Relevansi kurikulum pondok pesantren dengan era globalisasi (studi di pondok pesantren nurul Jadid Paiton Probolinggo), diakses 18 April 2013.
- Amat, N., Dwi, S.A., & Etistika, W.Y. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*. Vol (1); 2528-259X.
- Dery, M., & Puopiel, F. (2013). Radio upper west and political education of students in the university for development studies. *International Journal of Scientific and Research Publications*. Vol 3(12).
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2021). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2);43-51.
- Rohman, E.I. (2023). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke origarki. *Jurnal ilmu politik*. Vol 16(1); 01-12.
- Sarwikowi., & Susilo, A. (2015). Perkembangan Sejarah Abad 21 dalam menghadapi tantangn arus globalisasi.
- Susilowati., Ariska, D., Najicha, F.U, and Sebelas Maret. Dampak Teknologi Abad Ke-21 dan Media Sosial terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan*, Artikel JIPPK <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Syafhendry. (2024). Pengantar Ilmu Politik. Rajawali Pers: Depok.
- Tobing, S. M. (2019). Pemanfaat Jurnal Pendidikan dan peneliti sejarah. Vol 2(1); 43-50.
- Warsita, B. (2017). Peran Dan Tantangan Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pada Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Kwangsan*. Vol 5(2);14.
- Zulfa, A., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Vol 3(2); 65.